

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Efektivitas pengelolaan wakaf oleh nadzir dalam hal ini sangat sentral untuk mengelola wakaf yang telah diterimanya. Berhasil atau tidaknya untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf itu sangat tergantung kepada peranan nadzir yang bersangkutan yang telah dipercaya sepenuhnya oleh wakif. Seorang nadzir didalam pengelolaan wakaf agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya penerapan manajemen yang baik dari segi tujuan, sistem yang digunakan dan perilaku nadzir dalam melaksanakan tugasnya, karena nadzir wakaf berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dalam pengelolaan wakaf dan mewujudkan keuntungan-keuntungan bagi tujuan wakaf dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan oleh wakif sebagaimana disampaikan oleh direktur pemberdayaan wakaf (Muliadi, 2016: 18).

Taraf pencapaian suatu tujuan, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan seperti tanah wakaf yang sudah dikelola dengan baik dan di kembangkan oleh nadzirnya sendiri karena dengan nadzir yang mengelola akan lebih bermanfaat, karena dari hasil tanah wakaf tersebut bisa di kembangkan kembali seperti luas tanah wakaf yang dibangun untuk masjid dan masih memiliki sisa tanah. Maka nadzir berfikir bagaimana jika tanah tersebut ditanamkan untuk pengelolaan kebun yang ditanamkan dengan pohon pisang, maka lebih efektif jika nadzir sendiri yang melakukan pengelolaan tersebut. efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat dicapai oleh nadzir. efektif bukan hanya bentuk pencapaian saja tetapi dilihat dari pencapain target nadzir apakah sesuai dengan awal target yang diberikan oleh wakif.

Efektif adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Dari beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan (Anohib, 2017: 9).

Pengelolaan nadzir adalah bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf. Seberapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi ini di masa mendatang. Sebaliknya, jika SDM tidak dikelola dengan baik, efektivitas pengelolaan wakaf tidak akan tercapai. Nadzir merupakan salah satu unsur yang paling penting bagi organisasi pengelola wakaf. Hal ini terjadi karena nadzir sangat memengaruhi efesiensi dan efektifitas organisasi. Begitu pentingnya manajemen SDM ini, bila diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasarannya.

Jika pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh nadzir maka pengelolaan wakaf tersebut lebih efektif karena banyak tanah wakaf yang tidak dikelola dengan baik, maka salah satunya jika tanah wakaf itu dikelola langsung oleh nadzirnya sendiri maka secara tidak langsung sumber ekonomi wakaf itu ada, karena nadzir dibina langsung oleh kementrian agama dan (BWI), dan secara tidak langsung pengelolaan wakaf tersebut bisa dimanfaatkan untuk banyak orang seperti ditanamkan pohon pisang atau ditanamkan padi itu maka lebih ekonomis nilai sumbernya, dan memberikan contoh kepada nadzir yang lainnya.

Maka pengelolaan tanah tersebut bisa dilakukan oleh nadzirnya sendiri. Seperti penelitian yang saya lakukan banyak tanah wakaf yang tidak diurus karena tidak adanya biaya hanya tanah wakafnya saja, tetapi dari pihak DKM kecamatan memberikan solusi kepada yang mengelolanya bagaimana jika tanah wakaf yang belum dibangun kita bangun dari hasil

tanah sawah yang masih ada kaitannya dengan tanah wakaf. Dan hasil tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan petunjuk dari kementerian agama yang sudah membina nadzir secara langsung. tanah sawah tersebut dikelola oleh nadzir dan seluruh kebutuhan sawah dipenuhi dari nadzirnya sendiri seperti dibelikan bibit dan bentuk perawatan lainnya seperti pupuk dan pestisida/cairan untuk membunuh hama pada tanaman.

Hubungan nadzir dengan kementerian agama adalah berkaitan dengan adanya sertifikasi tanah wakaf tersebut dan diberikan amanah oleh kementerian agama. karena melalui pejabat akta ikrar wakaf di KUA. Dan harus melalui prosedur Salah satunya cap, tanda tangan kepada pihak KUA, surat mengesahkan nadzir, melakukan surat permohonan sertifikat yang ditunjukkan BPN (badan pertanahan nasional), dan menghitung ikrar wakaf.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf. Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan agar wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga wakaf itu tidak sia-sia. Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab (Faiz, 2013: 11).

Nadzir (pengelola) masih tradisional dan cenderung belum produktif. Oleh karena itu para ahli fikih mengharuskan wakif (orang yang wakaf) untuk menunjuk nadzir wakaf yang profesional. Nadzir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tetapi para nadzir wakaf di Indonesia kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbilang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (nonproduktif). Maka tak heran, jika pemanfaatan tanah wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid padahal masjid sebenarnya juga bisa diproduktifkan dan menghasilkan ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian Islam di dalamnya, seperti BMT, lembaga zakat, wakaf, mini market, dan sebagainya (Kasdi, 2014: 213).

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. akan tetapi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga belum dilindungi oleh kekuasaan. Pada masa kesultanan (Budiman, 1390: 99).

Tugas nadzir selain bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, Nadzir juga bertugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf yang dikelolanya (Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004).

Nadzir sebagai pihak yang penting dalam perwakafan dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Kedudukan nadzir dalam perwakafan sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri. Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11, ditentukan bahwa nadzir memiliki tugas sebagai berikut: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia (BWI).

Setelah wakif melaksanakan ikrar wakaf, nadzir yang memiliki peran terhadap harta benda tersebut, baik dari proses administrasinya maupun pengelolaannya, sehingga tujuan dan fungsi harta wakaf dapat tercapai sesuai dengan peruntukannya. yang lebih utama lagi yaitu peran nadzir terhadap pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf untuk kepentingan masyarakat. karena tugas nadzir menyangkut harta benda yang manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat, maka jabatan nadzir harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas tersebut. Sekarang ini masih banyak harta wakaf yang belum dikelola secara efektif sebagai mana mestinya sesuai dengan perkembangan masa depan langka pembangunan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, serta wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis dalam harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Fikri Ahmadi, 2018: 7).

Sedangkan dasar harta wakaf adalah untuk diambil manfaatnya sebanyak mungkin untuk jalan yang di ridhoi Allah SWT dan kemaslahatan umat. tetapi pada kenyataannya, pemanfaatan harta wakaf belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan wakaf (Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan hukum-hukum yang menyangkut dengan wakaf, disamping kurangnya perhatian dari pemuka agama dan pemerintah sendiri dalam pengurusan dan pemanfaatan harta wakaf. Tetapi sebenarnya berkembang tidaknya harta wakaf, salah satunya banyak tergantung pada nadzir (pengelola), baik yang dikelola secara perorangan, organisasi, ataupun badan hukum. walaupun mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf.

Namun para ulama sepakat bahwa wakif (orang yang mewakafkan hartanya) harus menunjuk nadzir wakaf. Dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nadzir merupakan unsur yang harus ada dalam

masalah wakaf. Hal ini mengingat pentingnya keberadaan nadzir agar harta wakaf itu harus tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia dan dapat dikembangkan secara terus menerus (Aisyah Ekawati, 2018: 33).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaporan pengelolaan wakaf di kementerian agama kabupaten Cirebon. Sehingga, dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul: **“EFEKTIFITAS KEWAJIBAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Nadzir yang mempunyai peran penting dalam mengelola wakaf belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
- b. Nadzir harus mempunyai kemampuan dan kapasitas agar dapat mengembangkan wakaf sesuai peruntukannya

2. Pembatasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian proposal skripsi lebih terarah, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu:

- a. Strategi nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf di kementerian agama.
- b. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan harta benda wakaf.
- c. Kurangnya pelatihan tentang nadzir.

3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas tercermin masih adanya harta tanah wakaf yang belum dikelola efektif dan baru sebagian kecil harta tanah wakaf yang telah dikelola secara produktif, sehingga harta tanah wakaf tersebut belum mendatangkan suatu hasil guna yang optimal

secara ekonomis untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektifitas kewajiban nadzir dalam pengelolaan wakaf di kementrian agama kabupaten Cirebon?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas nadzir dalam pengelolaan wakaf di kementrian agama kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas nadzir dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di kementrian agama kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui kompetensi nadzir dalam mengelola aset wakaf di kementrian agama kabupaten Cirebon.

D. Literatur Review

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa peneliti terdahulu yang erat kaitannya dengan judul peneliti saat ini antara lain sebagai berikut: “Pertama, Skripsi “Muliadi” yang berjudul “analisis efektivitas pengelolaan harta tanah wakaf di kecamatan kundur barat” dengan tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui peningkatan ekonominya dan produktifitas ekonomi di wilayah kundur barat, 2) Mengetahui pengelolaan pengawasan tanah wakaf di wilayah kundur barat. Dengan hasil penelitian: 1) memberi manfaat bagi perekonomian secara mikro dan makro. 2) Bahwa strategi dalam efektivitas nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf mempunyai potensi dan manfaat ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya masih kurang efektif (Asrori, 2019: 35).

Kedua, skripsi “Espan Diari” yang berjudul “Efektivitas nadzir dalam pengelolaan dan pemanfaatn harta wakaf (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah) dengan tujuan penelitian: 1) untuk mengetahui efektivitas nadzir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di panti asuhan mardhatilah. 2) untuk mengetahui dan menjelaskan efektifitas nadzir dalam

pemanfaatan harta wakaf Panti Asuhan Mardhatillah. Dengan hasil penelitian: 1) harta wakaf yang bersifat produktif masih belum optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) karena kurangnya pelatihan oleh nadzir (Diari, 2013: 3-4).

Ketiga, skripsi “Maura” yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Pengelolaan Harta Tanah Wakaf Oleh Nadzir” dengan tujuan penelitian: 1) untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. 2) Peran nadzir sangat utama dalam menjaga dan mengurus harta wakaf. Dengan hasil penelitian: 1) apabila nadzir telah meninggal maka wakaf tersebut diganti dengan nadzir yang baru. dan dikelola harta wakaf tersebut oleh nadzir yang baru. Dan wakif harus memberikan kepercayaan oleh nadzir dalam pengelolaan harta wakaf yang memiliki peran penting. 2) dan nadzir pun harus mempunyai kemampuan baik dalam bidang manajemen dan bisnis. Seperti mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan, profesional dalam bidang pengelolaan harta, memiliki program kerja yang jelas, dan mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur (Moura, 2004: 24).

Keempat, skripsi “Remi Azmi Furri” yang berjudul “Tinjauan yuridis atas peranan nadzir dalam mengelola harta wakaf berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf di kabupaten lumajang” dengan tujuan penelitian: 1) untuk mengetahui peranan nadzir dalam penyelesaian sengketa atas harta wakaf, 2) serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban nadzir upaya untuk mengatasinya, dengan hasil penelitian: 1) melakukan perdamaian atas suatu perjanjian dengan kedua belah pihak dengan menyerahkan. 2) kesadaran tentang wakaf yang minim, serta belum efektifnya dalam beberapa ketentuan dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf (Nurmaulan, 2016: 22).

Kelima, skripsi “Nurohmat” yang berjudul “Pemahaman nadzir tentang perwakafan dan efektivitasnya terhadap pengelolaan wakaf” dengan

tujuan penelitian: 1) Untuk Mengetahui pemahaman Nadzir di Yayasan Al-Muflihun, 2) Untuk mengetahui Pengelolaan harta wakaf yang ada di Yayasan Al- Muflihun, Dengan hasil penelitian: 1) pemahaman nadzir turut mempengaruhi efektivitas pengelolaan harta wakaf tentang hukum perwakafan dan peran nadzir tersebut efektifitasnya terhadap pengelolaan wakaf, 2) pengadministrasian tanah wakaf, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja para pelaksana. dan meningkatkan profesionalitas dan keahlian para pengurus dan pelaksana, berkembangnya yayasan al-muftihun dimana hanya adanya masjid sampai memiliki berbagai asset seperti gedung TPA dan PAUD karena pengelolaan nya sangat baik (Nurohmat, 2015: 78).

Keenam, Jurnal “Zahran.R” yang berjudul “Studi tentang efektivitas kenaziran harta wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf” Dengan permasalahan: 1) kinerja nadzir dalam pengelolaan harta wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2) Bagaimana peran dalam efektifitas harta wakaf, Dengan hasil penelitian: 1) pihak yang menerima harta benda wakaf diperluas sehingga nadzir yang dapat menerima harta benda wakaf tidak hanya nadzir perorangan tetapi juga nadzir organisasi dan nadzir badan hukum. 2) pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Rafid.Z, 2017: 11).

Ketujuh, Jurnal “fachrodin” yang berjudul “Peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004” Dengan permasalahan: 1) Tugas nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi, 2) Permasalahan pengelolaan wakaf oleh nadzir di Desa Ngadi, Dengan hasil penelitian: 1) Melakukan administrasian harta benda wakaf dan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. selain itu mengelola juga bertugas untuk mengembangkan harta benda wakaf, 2) dengan adanya akta ikrar

wakaf, maka sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengajukan dana lewat proposal dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pengelolaannya tidak menjadi tanggung jawab nadzir lagi (Fachrodin, 2004: 49).

Kedelapan, Skripsi “Didin Najmudin” yang berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Di desa Babakan” Dengan Permasalahan: 1) Bagaimana pengelolaan tanah wakaf di desa babakan 2) Cara nadzir untuk mengefektifkan tanah wakaf, Dengan hasil penelitian: 1) Belum memiliki standar operasional, dan masih lemahnya SDM, 2) Nadzir perlu dibina secara terus menerus agar mampu mengeluarkan ide dan kreasi baru dalam hal pengelola tanah wakaf. Mensejahterakan masyarakat dan didorong untuk lebih kreatif (Najmudin, 2011: 70).

E. Kerangka Pemikiran

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai suatu tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan, dalam ukuran efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung kepada siapa yang akan menilai dan pandangan, tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan (Hoerudin, 2017: 38).

Di Indonesia nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh Undang-Undang No. 41/2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia. wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli ekonomi Islam, ahli perbankan Islam dan para cendekiawan lainnya yang memiliki perhatian terhadap perwakafan.

Dalam mengelola wakaf produktif lebih baik dilakukan pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan keuangan, adapun selebihnya adalah memberikan pelayanan dan support kepada pengurus harta wakaf produktif. Diantara bentuk pelayanan terpenting dalam hal ini adalah ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana (Fitria, 2013: 89).

Kewajiban nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan, sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri. Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab (Tiswarni, 2014: 68).

Tugas Nadzir profesional tidak berhenti sampai pada pengelolaan harta wakaf saja. Ia masih memiliki tugas untuk mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf yang telah dikelola kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*Mauquf 'alaih*). Nadzir harus membagikan hasil wakaf kepada para mustahik. Pembagian hasil wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh nadzir kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan harta wakaf atau melunasi kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf. Ini karena, hal-hal tersebut harus didahulukan ketimbang menyerahkan hasil wakaf kepada mustahik. Semua ketentuan pendistribusian hasil wakaf kepada para mustahik harus berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan wakif (Ridwan, 2012: 91).

Manajemen pengelolaan wakaf uang dimulai dari penghimpunan dan menyalurkan dana. maka dalam penghimpunan dan penyaluran dana wakaf uang terdapat beberapa tahapan, sebelum dana wakaf uang tersebut sampai pada yang berhak menerimanya. yang pertama ialah pendataan yang berguna untuk mendata siapa saja yang berhak menerima wakaf uang

mauquf alaih jangan sampai dana tersebut diterima kepada yang tidak berhak menerimanya. yang kedua adalah memilah, memilah keuntungan dana wakaf dengan pokok wakaf yang telah dikelola atau diinvestasikan karena dana wakaf yang diperoleh dari wakif (yang berwakaf) akan dikelola oleh nadzir (pengelola wakaf). Dari pengelolaan dana wakaf uang tersebut maka keuntungan yang akan diwakafkan kepada *mauquf alaih*. Ketiga adalah pendistribusian, hasil keuntungan dari investasi tersebut maka akan didistribusikan kepada *mauquf alaih*. Melalui dana kesehatan, pendidikan, rehabilitas keluarga, bantuan untuk bencana alam dan sebagainya (Atabik, 2016: 82).

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah kepada kementrian agama kabupaten Cirebon.

yaitu sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku fiqih dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan

tentang kompetensi nadzir dalam Pengelolaan efektifitas nadzir pengelolaan harta benda wakaf di kementerian agama kabupaten Cirebon

2. Jenis dan Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah data mengenai permasalahan tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir di kementerian agama kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Maksudnya data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen yang ada yang berkaitan dengan wakaf terutama mengenai masalah tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir di kementerian agama kabupaten Cirebon.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi ini dilakukan di kementerian agama kabupaten Cirebon. Dalam hal ini yang di observasi adalah mengenai masalah perwakafan yang ada di kementerian agama kabupaten Cirebon. yang lebih lanjut diaplikasikan tentang tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir.

b. Wawancara atau Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan kepada pejabat kementerian agama yang menangani masalah wakaf dan dari lima nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan wakafnya kepada kementerian agama di kabupaten Cirebon, dan para pihak terkait.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumentasi. yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada kementerian agama kabupaten Cirebon.

4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan efektifitas dan problematika nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf di kementerian agama kabupaten Cirebon. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan mempermudah pembahasan. Maka dijelaskan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Berisi tentang penjelasan secara garis besar mengenal permasalahan penelitian Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran, metodologi penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pencapaian nadzir tentang kajian tentang sebatas apa efektifitas kewajiban nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf yang diawali dengan menjelaskan secara ringkas dan jelas mengenal berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan agar dapat mendukung menyusun teori dan konsep landasan teori ini meliputi. Kajian konsep dan kerangka pemikiran.

BAB III: Kondisi Objektif Penelitian

berisi analisis data yang berupa : gambaran lokasi wakaf di wilayah kementrian agama kabupaten cirebon. bagaimana efektifitas nadzir Dalam pengelolaan harta tanah wakaf. fungsi nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian dan analisis data. Hasil penelitian meliputi: pencapaian nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf.

BAB V: Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai rangkaian hasil dari penelitian.

2. JADWAL RENCANA PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan			
		Oktober	November	Desember	Januari
1	Pra penelitian				
	Penyusunan proposal penelitian skripsi				
2	Pelaksanaan penelitian				
	Pencarian teori-teori yang terkait				
	Pengumpulan data dari objek penelitian				
	Pengolahan data				
3	Pasca penelitian				
	Penyusunan penelitian skripsi				